Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajarannya
ISSN 2089-0117 (Print)
ISSN 2580-5932 (Online)
Vol 14, No 2, Oktober 2024
Page 252 - 270

PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA INDONESIA DI MEDIA DARING: ANALISIS WACANA KRITIS
(*THE RELOCATION OF INDONESIA'S CAPITAL CITY IN ONLINE MEDIA: A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS)*

Agustina
SMA Negeri 1 Mekarsari
Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan
e-mail: agustina48@guru.sma.belajar.id

Abstract

The Relocation of Indonesia's Capital City In Online Media: A Critical Discourse Analysis*. The relocation of the nation's capital has become a controversial topic and has sparked widespread debate in online media. The main issue examined in this study is the form of support and rejection of the policy of relocating the capital city and the reasons behind it. This study uses a qualitative approach with Norman Fairchlough's critical discourse analysis method to identify different views in online media. The data sources come from articles on Kompas.com, Tempo.com, and Suaraislam.com on January 18 and 19, 2022. The findings of this study indicate that Kompas.com supports the policy of relocating the nation's capital city with emotional support, appreciation and information related to political, economic, historical and environmental aspects. In contrast, Tempo.com and Suaraislam.com show rejection, focusing on legal, political, economic and environmental aspects. Rejection on Tempo.com is conveyed through suggestions, comments and reasons for rejection, while Suaraislam.com expresses rejection using words such as "no" and critical comments. Based on these findings, it shows that the relocation of the nation's capital city has received very diverse responses in online media, reflecting differences in perspective. Based on the research results, it is recommended that the government reconsider the policy of moving the capital city by involving all aspects of life, including social impacts, infrastructure, and community needs.*
Keywords: *capital city relocation in Indonesia, support, opposition.*

Abstrak

Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia di Media Daring: Analisis Wacana Kritis. Pemindahan ibu kota negara telah menjadi topik yang kontroversial dan memicu perdebatan luas di media daring. Masalah utama yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk dukungan dan penolakan terhadap kebijakan pemindahan ibu kota serta alasan di baliknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana kritis Norman Fairchlough untuk mengidentifikasi pandangan yang berbeda di media daring. Sumber data berasal dari artikel di *Kompas.com*, *Tempo.com*, dan *Suaraislam.com* pada tanggal 18 dan 19 Januari 2022. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa *Kompas.com* bersikap mendukung kebijakan pemindahan ibu kota negara dengan bentuk dukungan emosi, penghargaan dan informasi terkait aspek politik, ekonomi, sejarah, dan lingkungan. Sebaliknya, *Tempo.com* dan *Suaraislam.com* menunjukkan penolakan, dengan fokus pada aspek hukum, politik, ekonomi, dan lingkungan. Penolakan di *Tempo.com* disampaikan melalui usulan, komentar, dan alasan penolakan, sementara *Suaraislam.com* mengekspresikan penolakan menggunakan kata-kata seperti "tidak" serta komentar kritis. Berdasarkan temuan tersebut menunjukkan bahwa pemindahan ibu kota negara mendapat respons yang sangat beragam di media daring, mencerminkan perbedaan perspektif. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan pemindahan ibu kota dengan melibatkan seluruh aspek kehidupan, termasuk dampak sosial, infrastruktur, dan kebutuhan masyarakat.
Kata-kata kunci: pemindahan ibu kota negara Indonesia, dukungan, penolakan

Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajarannya Vol 14, No 2, Oktober 2024
ISSN 2089-0117 (Print) Page 252 - 270
ISSN 2580-5932 (Online)

PENDAHULUAN

Perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur kembali ditegaskan presiden pada pertemuan dengan petinggi partai politik koalisi, Rabu 25 Agustus 2021 (Wiyono, 2021). Rencana ini menjadi resmi setelah Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) disahkan menjadi Undang-Undang pada 18 Januari 2022 melalui rapat paripurna ke-13 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (bbc.com, 2022b). Proses pengesahan yang cepat ini memunculkan beragam reaksi di masyarakat, terutama dari kalangan yang mempertanyakan kelayakan kebijakan ini dari aspek hukum, politik, ekonomi, sejarah, dan lingkungan. Di media sosial, penolakan ini disuarakan secara luas *#TolakUUIKN*, *#TolakPindahIbuKota*, dan *#IKNProyekOligarki* bermunculan di berbagai kanal (Hendarto, 2022).

Pemindahan ibu kota negara Indonesia memiliki keterkaitan dengan realitas politik yang sedang berkembang, terutama menjelang Pilpres 2024 dengan opini tiga periode (Budiman, 2021). Situasi dan tensi politik yang panas penuh intrik, menjadikan masyarakat Indonesia terbelah. Masyarakat Indonesia menghadapi polemik dalam merespon pemindahan ibu kota negara, tak terkecuali media dalam menyajikan informasi. Jurnalis di setiap media, sebagai bagian dari masyarakat, merepresentasikan prinsip, pandangan politik dan ideologi jurnalisme lembaga mereka dalam isi pemberitaannya. Perbedaan prinsip, pandangan politik dan ideologi inilah yang memunculkan pertentangan dalam merespon wacana pemindahan ibu kota negara Indonesia.

Beberapa penelitian terdahulu telah menelaah wacana pemindahan ibu kota di Indonesia, terutama dari perspektif dampak ekonomi dan infrastruktur. Penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2021) yang menyoroti dampak ekonomi dari pemindahan Ibu Kota Negara, serta studi Taufiq (2020) yang membahas implikasi infrastruktur. Namun, penelitian tentang representasi media dalam mendukung atau menolak kebijakan ini, terutama dari perspektif analisis wacana kritis, masih jarang dilakukan.

Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan mengkaji bagaimana media daring merepresentasikan dukungan dan penolakan terhadap kebijakan pemindahan ibu kota, menggunakan pendekatan analisis wacana kritis Norman Fairclough. Penelitian ini berfokus pada tiga media daring utama, yaitu *Kompas.com*, *Tempo.com*, dan *Suaraislam.com*, untuk melihat bagaimana pandangan politik, ideologi, dan prinsip jurnalisme masing-masing media berperan dalam membentuk opini publik terkait isu ini.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis perbandingan antar media daring dalam merespons kebijakan pemindahan ibu kota, serta bagaimana wacana tersebut mencerminkan perbedaan ideologi dan perspektif politik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap bagaimana dukungan dan penolakan terhadap kebijakan tersebut direpresentasikan di media daring, serta faktor-faktor yang mempengaruhi wacana tersebut.

Melihat isu ini akan terus muncul dan semakin hangat dibicarakan serta berdampak yang sangat besar ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, politik (Hasyim, 2022). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peran media dalam membentuk opini publik dan memberikan rekomendasi bagi pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang terlibat dalam proses pemindahan ibu kota.

TINJAUAN PUSTAKA

Analisis wacana kritis Fairclough (2013) terdapat tiga dimensi yang diperhitungkan yakni, deskripsi teks, interpretasi wacana, dan eksplanasi sosiokultural. Analisis pertama, deskripsi teks, digunakan untuk membongkar realitas dukungan dan pembangunan yang terkandung dalam teks. Dengan melakukan deskripsi teks secara rinci, analisis wacana kritis

Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajarannya
ISSN 2089-0117 (Print)
ISSN 2580-5932 (Online)
Vol 14, No 2, Oktober 2024
Page 252 - 270

dapat mengidentifikasi bagaimana realitas sosial, kekuasaan, dan dominasi tercermin dalam penggunaan bahasa dan struktur teks (Silalahi, 2018). Analisis kedua, interpretasi wacana berfokus pada penginterpretasian ideologi yang tergambar dalam pemberitaan wacana pemindahan ibu kota negara Indonesia di media daring. Analisis wacana kritis mencakup tidak hanya produksi teks, tetapi juga penerima dan interpretasi yang dihasilkan. Analisis ketiga menekankan pada hal-hal sosial dan kebudayaan yang melatarbelakangi wacana pemindahan ibu kota negara Indonesia di media daring. Penting untuk melakukan penelitian terhadap teks-teks yang menjadi latar belakangnya, termasuk peristiwa sosial dan budaya yang terkait.

Ada empat langkah yang telah digariskan oleh Fairclough (2013): pertama, fokus pada 'ketidakberesan sosial; kedua, mencermati hambatan-hambatan; ketiga, pertimbangan tatanan sosial itu apakah 'membutuhkan' ketidakberesan sosial tersebut; keempat, mencermati langkah yang memungkinkan mengatasi hambatan-hambatan. Di akhir melakukan tindak lanjut kritis pada tujuan ini untuk menggali kepentingan yang sudah dibekukan dalam bahasa (Haryatomoko, 2019).

Teori wacana Fairclough menekankan pemahaman tentang bahasa sebagai wacana yang merupakan bentuk "praktik sosial" (Fairclough, 2013). Terdapat tiga implikasi penting dalam pemahaman ini. Pertama, wacana dipandang sebagai bagian integral dari masyarakat. Wacana tidak dapat dipisahkan dari konteks sosialnya. Bahasa digunakan dan dipahami dalam konteks sosial yang melibatkan interaksi antara individu, kelompok, institusi, dan kekuatan sosial lainnya. Oleh karena itu, pemahaman wacana harus memperhitungkan hubungannya dengan masyarakat yang melingkupinya. Kedua, pemahaman wacana sebagai praktik sosial menekankan bahwa wacana adalah proses yang terus berubah seiring dengan perubahan sosial. Seperti halnya masyarakat berkembang, wacana juga mengalami perubahan dalam penggunaannya, norma-norma yang mengatur penggunaannya, serta dalam cara wacana memengaruhi dan dipengaruhi oleh praktik sosial yang berlangsung. Ketiga, wacana dipahami sebagai hasil dari kondisi sosial yang mempengaruhinya, dan sebaliknya, kondisi sosial juga dipengaruhi oleh wacana. Terdapat dialektika antara bahasa dan kondisi sosial di mana penggunaan bahasa dan wacana dipengaruhi oleh konteks sosial yang ada, sementara pada saat yang sama, bahasa dan wacana dapat membentuk, mempertahankan, atau mengubah kondisi sosial tersebut.

Dari sini terlihat bahwa realitas linguistik bersifat sosial, sementara realitas sosial juga memiliki sifat linguistik. Linguistik bersifat sosial karena linguistik sama sekali tidak dapat lepas dari pengaruh lingkungan sosialnya. Kondisi sosial juga bersifat linguistik karena aktivitas berbahasa dalam konteks sosial bukan hanya ekspresi atau refleksi dari proses dan praktik sosial, tetapi merupakan bagian dari proses dan praktik sosial tersebut. Oleh karena itu, sangat tepat apabila konsep wacana merupakan bentuk praktik sosial. Eriyanto (2001) menyebut Fairclough membangun model analisis yang mengintegrasikan secara bersama-sama analisis wacana yang didasarkan pada linguistik dan pemikiran sosial, dan diintegrasikan pada perubahan sosial. Oleh karena itu, model yang dikemukakan oleh Fairclough ini juga disebut sebagai model perubahan sosial (*sosial change*) (Eriyanto, 2001).

Pemindahan ibu kota negara Indonesia yang ramai diberitakan di media daring membuat terbelahnya pandangan masyarakat secara umum menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pro (setuju) dan kontra (menentang), hal ini membuat peneliti melihat polemik ketidakberesan sosial yang memerlukan pengkajian lebih dalam. Untuk itu analisis wacana kritis sangat relevan untuk menganalisnya dengan menambahkan teori dukungan dan penolakan.

Kelompok yang pro (setuju) terhadap wacana pemindahan ibu kota negara Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh media daring, menyajikan berita yang memuat kalimat

Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajarannya
ISSN 2089-0117 (Print)
ISSN 2580-5932 (Online)
Vol 14, No 2, Oktober 2024
Page 252 - 270

dukungan atau persetujuan. Ungkapan atau perkataan yang digunakan menggambarkan keharmonisan, sejalan dan tidak bertolak belakang dengan kebijakan pemindahan ibu kota negara Indonesia. Ada empat bentuk dukungan sosial menurut Smet, (Smet, 1994) yaitu: *pertama*, dukungan emosional yakni mencakup ungkapan empati, kepedulian dan perhatian. Dukungan emosional tidak hanya mencakup ungkapan empati dan perhatian, tetapi juga mencakup dukungan moral dan inspirasi yang dapat membantu seseorang mengatasi tantangan, menjaga semangat dan motivasi dalam menghadapi situasi yang sulit. *Kedua*, dukungan evaluatif adalah dukungan yang menekankan pada penghargaan dan pengakuan terhadap seseorang. Dalam dukungan ini, seseorang memberikan pujian, penghargaan, atau penilaian positif terhadap seseorang, sehingga membuat orang tersebut merasa dihargai dan disegani. *Ketiga*, dukungan instrumental berupa bantuan langsung sepeti pembelaan, perlindungan dapat berupa bantuan dalam bentuk materi, tenaga, atau dukungan praktis lainnya yang dapat membantu seseorang mengatasi stres atau masalah yang dihadapinya. *Keempat*, dukungan informatif adalah bentuk dukungan sosial yang bertujuan untuk memberikan informasi dan saran yang relevan untuk membantu seseorang mengatasi masalah yang sedang dihadapinya. Dukungan ini dapat berupa informasi yang spesifik, seperti panduan tentang cara menyelesaikan tugas atau masalah tertentu, atau informasi yang lebih umum, seperti penjelasan tentang cara mengatasi hambatan. Dukungan informasi dapat membantu seseorang memahami masalah yang sedang dihadapi, meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah, dan mengurangi rasa ketidakpastian dan kecemasan (Smet, 1994).

Kelompok yang kontra (menentang) atau memberikan kritik dalam hal ini diwakili oleh media daring, menyajikan berita yang memuat kalimat penolakan. Penolakan merupakan sebuah kalimat yang diungkapkan dengan tujuan untuk menolak sebuah ide, pendapat, maupun gagasan yang dilontarkan oleh orang lain. Teori penolakan yang cocok menurut peneliti menggunakan teori milik Kartomihardjo karena teori tersebut langsung mengarah kepada bentuk-bentuk penolakan. Ada tujuh bentuk penolakan yang digunakan dalam penelitian ini dari teori Kartomihardjo, yaitu: *pertama*, menggunakan kata 'tidak' atau padanan katanya. *Kedua*, memberikan alasan penolakan. *Ketiga*, menggunakan syarat atau kondisi sebagai pengganti penolakan. *Keempat*, penggunaan usul atau saran. *Kelima*, adanya alternatif atau pilihan lain. *Keenam*, dengan menggunakan terima kasih. *Ketujuh*, menggunakan komentar (Nabilah, 2016),.

Dalam penelitian ini, teori wacana kritis Norman Fairclough dikombinasikan dengan Teori Kuasa Simbolik Bourdieu untuk menggali bagaimana kekuasaan direpresentasikan dan dikonsolidasi melalui wacana media terkait kebijakan pemindahan ibu kota negara. Fairclough berfokus pada analisis wacana sebagai alat untuk memahami relasi kekuasaan dalam bahasa, sementara Bourdieu menawarkan kerangka yang menjelaskan bagaimana kekuasaan simbolik bekerja untuk mempertahankan dominasi melalui praktik sosial dan budaya. Kombinasi kedua teori ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap peran media dalam membentuk persepsi publik, di mana wacana yang digunakan tidak hanya merefleksikan realitas, tetapi juga menjadi alat untuk memperkuat atau menentang kekuasaan yang mendasari kebijakan publik. Dengan demikian, pendekatan ini relevan untuk mengungkap dinamika kuasa yang beroperasi melalui pemberitaan dukungan dan penolakan terhadap kebijakan tersebut.

Teori kuasa simbolik yang dirumuskan oleh Bourdieu sangat tepat digunakan untuk menganalisis ketidakadilan di dalam kebijakan-kebijakan bahasa simbolik (*language policy*). Kuasa simbolik akan memberikan status resmi pada bahasa, maka secara langsung bahasa lain terpinggirkan. Akibatnya kelompok yang mendapat kuasa dalam bahasa secara otomatis akan mendapat keuntungan ekonomi, politik, maupun sosial yang lebih besar daripada kelompok

Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajarannya
ISSN 2089-0117 (Print)
ISSN 2580-5932 (Online)
Vol 14, No 2, Oktober 2024
Page 252 - 270

yang tidak. Kelompok yang mendapatkan kuasa ini memiliki apa yang disebut oleh Bourdieu sebagai modal linguistik (*linguistic capital*).

Modal linguistik inilah yang memungkinkan mereka memiliki sumber daya ekonomi, politik, maupun sosial yang lebih besar. Hal ini menegaskan bahwa kelompok yang tidak memiliki modal linguistik tidak mampu ikut berkompetisi di dalam arena ekonomi maupun politik. Bourdieu telah menekankan bahwa yang dia maksud dengan *symbolic power* adalah kekuasaan yang cenderung melahirkan kuasa simbolik, kuasa yang terlihat seolah-olah bukan kuasa yang nyata atau secara fisik, malah terlihat seolah-olah kekuasaan tersebut sesuatu yang legitimate atau absah. Jadi, kuasa yang dimaksud oleh Bourdieu tidaklah menunjuk pada jenis-jenis kuasa tertentu, dia menjelaskan tentang sebuah aspek bagaimana kekuasaan dipraktikkan dari beragam jenis kekuasaan yang ada. Praktik penggunaan itu selalu terlihat sebagai suatu mekanisme yang samar-samar atau terselubung, dijalankan secara serentak pada waktu yang berdekatan, terus menerus tanpa disadari dan tersembunyi. Dia juga menyatakan bahwa bahasa dijadikan sebagai suatu tatanan, perangkat nilai, cara pikir dan struktur yang mempengaruhi orang sebagai aktor, pelaku (subjek).

Masih menurut Bourdieu bahwa kuasa simbolik yang bisa menyeragamkan group atau kelompok dalam masyarakat tentu merupakan bentuk praktik kekuasaan yang canggih-kompleks (*par excellence*). Dapat dipahami bahwa kekuasaan menyiapkan ruang kelompok sosial, pikiran yang dipaksakan, hasrat, ide dan visi secara halus dan canggih, tentu aksi 'manipulasi' tersebut didasarkan pada otoritas sosial yang dikuasai oleh aktor (pelaku). Otoritas sosial yang mampu menjadikan pihak lain 'tersihir' dan patuh pada perkataan aktor, salah satunya adalah modal simbolik. Modal simbolik merupakan pengakuan yang memadai untuk berada dalam posisi yang dapat membuat manipulasi dan pemaksaan malah diakui sebagai sesuatu yang legitimate.

Boudieu menjelaskan bahwa

"…symbolic power is that invisible power which can be exercised only whith the complicity of those who do not want to know that they are subject to it or even thet themselves exercise it" (Bourdieu, 1991)

"…kuasa simbolik adalah praktik kekuasaan atau kuasa yang tidak nampak, tidak kelihatan mata (*invisible*) yang hanya bisa dijalankan dengan keterlibatan orang-orang yang tak ingin tahu bahwa mereka adalah sasarannya, atau bahkan mereka sendiri menjalankannya".

Dari pemahaman ini maka ketentuan suatu praktik kekuasaan dikatakan sebagai kekuasaan simbolik (*symbolic power*) adalah harus berwujud sebagai kekuasaan yang tidak nampak melalui instrumen bahasa. Ideologi merupakan leading *principle* atau sebuah landasan untuk menginterpretasi sesuatu. Di dalam *leading principle* tersebut terdapat nilai-nilai, pandangan, serta sikap yang ada dalam diri seseorang. Nilai, pandangan, serta sikap tersebut dipengaruhi oleh penanaman budaya dalam diri yang bersangkutan sehingga dalam tindakannya tidak terlepas dari dorongan ideologi yang dianutnya tersebut.

Membongkar ideologi dibalik wacana tersebut juga sangat penting, menurut Jager dan Maier (Haryatmoko, 2016). Unsur yang perlu diperhatikan yaitu: konteks, luaran konteks, sarana retorika, isi dan pertanyaan ideologis, kekhasan-kekhasan lain dari artikel itu serta posisi wacana dan apa pesan utama tulisan itu (Haryatmoko, 2019).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis wacana kritis model Fairclough. Pendekatan ini digunakan untuk mengungkap bagaimana kekuasaan dan ideologi direfleksikan dan diperkuat melalui bahasa dalam wacana pemindahan ibu kota negara di media daring. Dalam analisis wacana kritis ini, kemampuan memprediksi sangat

Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajarannya
ISSN 2089-0117 (Print)
ISSN 2580-5932 (Online)
Vol 14, No 2, Oktober 2024
Page 252 - 270

tergantung pada langkah pertamanya, yaitu ketika merumuskan 'ketidakberesan sosial'. Dalam perumusan ini diperlukan teoretisasi dengan meminjam satu atau lebih teori yang relevan. Kemampuan keteramalan dan terbuka- tidaknya terhadap falsifikasi sungguh tergantung pada pilihan teori tersebut. Pilihan teori menentukan konteks determinasi penelitian. Maka pengorganisasian penelitian analisis wacana kritis perlu mengacu kepada konteks determinasi metodologis, yaitu keseluruhan prosedur, teknik dan skema pemikiran yang diterapkan oleh suatu bidang disiplin ilmu tertentu untuk mengelaborasi hasil-hasilnya (Berthelot, 2001).

Penelitian ini juga menggunakan teori dukungan dan penolakan untuk memperkuat hasil analisis dalam mendeskripsikan bentuk dukungan dan penolakan dalam wacana pemindahan ibu kota negara Indonesia di media daring. Kemudian kerangka teori kuasa simbolik yang dikembangkan oleh Pierre Bourdieu untuk menemukan bahasa digunakan untuk meraih kuasa, dominasi dan hegemoni. Dari sini juga akan terlihat ideologi dari masing-masing media. Untuk memudahkan analisis data pada, penelitian awal memakai teori dukungan dan penolakan dengan melakukan analisis teks berkaitan dengan pilihan kata dan penggunaan kalimat.

Pendekatan analisis wacana kritis Fairclough juga menggali data dan memasuki proses interpretasi, dalam penelitian ini menambahkan teori kuasa simbolik dan ideologi untuk selanjutnya menemukan konteks sosial budaya yang melatarbelakangi dukungan dan penolakan dalam wacana pemindahan ibu kota negara Indonesia di media daring. Untuk memudahkan analisis data pada tahap ini, peneliti memaparkan alasan yang dikemukakan dari aspek hukum, politik, ekonomi, sejarah, dan lingkungan dari masing-masing media daring yang telah dipilih.

Data yang dianalisis berupa teks berita yang diambil dari tiga media daring, yaitu *Kompas.com, Tempo.com, dan Suaraislam.com*, yang diterbitkan pada tanggal 18 dan 19 Januari 2022. Sumber data ini dipilih karena ketiga media tersebut merepresentasikan perspektif yang berbeda dalam merespons kebijakan pemindahan ibu kota.. Subjek dalam penelitian ini adalah wacana pemindahan ibu kota negara Indonesia di media *Kompas.com* pada Selasa, 18 Januari 2022 dengan judul "Tentang Ibu Kota Baru Nusantara dan 8 Hal yang Ditawarkan, Salah Satunya Nol Persen Kemiskinan pada 2035", Rabu, 19 Januari 2022 dengan judul "Reaksi Media Asing soal Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia, Singgung Nama Nusantara hingga Ahok", dan Selasa, 8 Februari 2022 dengan judul "Pemindahan Ibu Kota Negara di Mata Tokoh Politik Prabowo, Ganjar, Anies, Ridwan Kamil". Media *Tempo.com* pada Selasa, 18 Januari 2022 dengan judul "RUU IKN Sah, Jatam: Jokowi dan DPR Tak Peduli Soal Kesulitan Ekonomi", dan Rabu, 19 Januari 2022 dengan judul "Koalisi Masyarakat Kaltim Anggap UU Ibu Kota Negara Cacat Prosedural". Media *SuaraIslam.com* pada Rabu, 19 Januari 2022 dengan judul "WALHI: UU Ibu Kota Negara Baru Inkonstitusional Seperti *Omnibus Law*" dan Rabu, 19 Januari 2022 dengan judul "Hancur-hancuran Pindah Ibu Kota Negara". Objek penelitian fokus pada bentuk dukungan dan penolakan yang mengandung unsur kuasa simbolik dan ideologi serta latar belakang munculnya dukungan dan penolakan dalam wacana pemindahan ibu kota negara Indonesia di media daring.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data, ditemukan berbagai bentuk dukungan dan penolakan dalam wacana pemindahan ibu kota negara Indonesia di media daring. Dari dimensi teks, bentuk dukungan yang teridentifikasi terdiri dari dukungan emosional, dukungan evaluatif, dan dukungan informasional. Sebaliknya, penolakan terwujud dalam penggunaan kata "tidak" atau padanan katanya, pemberian alasan penolakan, penggunaan syarat atau kondisi sebagai

Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajarannya
ISSN 2089-0117 (Print)
ISSN 2580-5932 (Online)
Vol 14, No 2, Oktober 2024
Page 252 - 270

bentuk substitusi penolakan, penyampaian usulan atau saran, serta komentar kritis.

Memahami wacana ini secara komprehensif juga melihat dimensi produksi dan konsumsi teks. Proses produksi teks sangat dipengaruhi oleh pandangan politik, ideologi, dan tujuan media yang bersangkutan. Media yang mendukung kebijakan pemindahan ibu kota cenderung mengkonstruksi narasi positif melalui pemilihan bahasa yang menggiring opini publik menuju penerimaan kebijakan tersebut. Sebaliknya, media yang menolak menggunakan wacana yang secara simbolik menolak dominasi kekuasaan, dengan fokus pada aspek-aspek yang menimbulkan keraguan publik, seperti isu hukum, politik, dan lingkungan.

Terkait konsumsi teks, pembaca teks terlibat aktif dalam menafsirkan informasi berdasarkan konteks sosial, ekonomi, dan politik mereka. Teks tidak hanya diterima secara pasif, tetapi juga diproses melalui perspektif pembaca yang dipengaruhi oleh posisi mereka dalam struktur sosial. Oleh karena itu, hubungan antara wacana dalam teks dan konteks di luar teks sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-politik yang sedang berlangsung. Proses produksi dan konsumsi wacana ini berfungsi sebagai alat kuasa simbolik yang mencerminkan dan memperkuat dinamika kekuasaan di masyarakat, sehingga memainkan peran penting dalam pembentukan opini publik terkait kebijakan pemindahan ibu kota negara. Hasil dari penelitian ini dipaparkan sebagai berikut:

Bentuk Dukungan dan Penolakan

Pemberitaan yang memuat bentuk dukungan dan penolakan yang menunjukkan kuasa simbolik dan mencerminkan ideologi media daring dalam wacana pemindahan ibu kota negara Indonesia akan ditampilkan dalam bentuk tabel kemudian disajikan pemaparan analisis teks dan praktik diskursif.

Tabel 1 Temuan Data Bentuk Dukungan dan Penolakan di Media *Kompas.com*

No.	Media	Dukungan	Penolakan
1.	Selasa, 18 Januari 2022 dengan judul *"Tentang Ibu Kota Baru Nusantara dan 8 Hal yang Ditawarkan, Salah Satunya Nol Persen Kemiskinan pada 2035"* (Bramasta, 2022).	[5], [8], [9], [10], [11]	
2.	Rabu, 19 Januari 2022 dengan judul *"Reaksi Media Asing soal Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia, Singgung Nama Nusantara hingga Ahok"* (Adhi, 2022).	[1], [2], [3], [6], [7], [12]	[17], [18]
3.	Selasa, 8 Februari 2022 dengan judul *"Pemindahan Ibu Kota Negara di Mata Tokoh Politik Prabowo, Ganjar, Anies, Ridwan Kamil"* (Retaduari, 2022).	[4], [13], [14], [15]	[16]

a. Dukungan emosi

[1] Pemindahan ibu kota Indonesia disepakati karena DKI Jakarta "akan tenggelam".

[2] Pemerintah Indonesia berharap pemindahan ibu kota dapat mengurangi beban Jakarta, kota berpenduduk 10 juta jiwa yang terkenal macet dan sering dilanda banjir.

[3] dan (Jakarta) merupakan salah satu kota di dunia yang paling cepat tenggelam akibat pengambilan air tanah yang berlebihan. Sebagian wilayah Jakarta Utara mengalami penurunan sekitar 25 sentimeter per tahun

[4] Ganjar pun merasa senang karena Presiden Jokowi berjanji membangun kebun bibit di ibu kota negara baru. Karena mengusung konsep *smart city*, ibu kota negara baru disebut akan menggunakan transportasi listrik.

Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajarannya
ISSN 2089-0117 (Print)
ISSN 2580-5932 (Online)
Vol 14, No 2, Oktober 2024
Page 252 - 270

Data [1] menggunakan klausa ’karena DKI Jakarta akan tenggelam’, pada data [2] menggunakan klausa ‘dapat mengurangi beban Jakarta’ dan pada data [3] ‘kota di dunia yang paling cepat tenggelam’. Ketiga kutipan di atas termasuk dalam bentuk dukungan emosi karena mencerminkan kepedulian terhadap masalah yang sedang terjadi, yaitu kemacetan, banjir yang sering terjadi dan potensi bahaya penurunan tanah di Jakarta. Dalam hal ini, kalimat tersebut dapat memicu perasaan simpati atau empati pada masyarakat, dan mempengaruhi mereka untuk lebih memperhatikan atau memperjuangkan solusi atas masalah yang terjadi di ibu kota.

Penggunaan kata ‘akan’ dan ‘dapat’ dalam kutipan tersebut menunjukkan kemungkinan terjadinya peristiwa yang diopinikan. Dari sini ditemukan indikasi kuasa simbolik yang secara halus mencoba untuk mempengaruhi masyarakat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi jika tidak segera pindah ibu kota negara, kemudian kuasa simbolik ini menggiring masyarakat untuk berpikir dan mengakui Jakarta yang sudah tidak mampu menahan beban sebagai ibu kota negara. Masyarakat diarahkan agar menerima alasan-alasan pemindahan ibu kota negara.

Data [3] frasa ‘paling cepat’ menunjukkan perbandingan dengan kota-kota lain. Ini bisa menunjukkan bahwa Jakarta menghadapi risiko tenggelam yang lebih tinggi dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Kata ‘tenggelam’ dapat menggambarkan kehancuran, kerugian, atau kehilangan yang signifikan.

Data [4] merupakan bentuk dukungan emosi dengan adanya kata ‘senang’ yang menunjukkan rasa sayang dan perhatian terhadap gagasan yang direncanakan. Perasaan senang ini dapat menjadi kuasa simbolik yang menyimpan maksud dibalik dukungannya terhadap rencana Presiden Jokowi, bisa berupa hal yang positif yakni sesuatu yang tulus dan jujur maupun hal manipulatif dalam rangka mencari perhatian. Apalagi ungkapan ini disampaikan oleh tokoh politik.

b. Dukungan penghargaan

[5] Dibangun dengan identitas nasional, IKN akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris, serta mempercepat transformasi ekonomi Indonesia

[6] Pengesahan RUU Ibu Kota Negara (IKN) menjadi undang-undang adalah kemajuan paling signifikan dari sebuah gagasan yang telah dilontarkan oleh para pemimpin negara Indonesia sejak bertahun-tahun lalu.

[7] Pemindahan ibu kota diyakini akan memperkuat rantai pasokan dan menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih strategis di jalur perdagangan dunia, arus investasi, dan inovasi teknologi

Data [5] menunjukkan dukungan penghargaan terhadap identitas nasional Indonesia karena menyatakan pembangunan akan diorientasikan ke arah Indonesia-sentris demi kepentingan dan keutamaan Indonesia sebagai negara. Disebutkan juga bahwa ibu kota negara baru akan mempercepat transformasi ekonomi Indonesia, yang dapat dianggap sebagai dukungan terhadap kemajuan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Kata ‘mempercepat’ merujuk pada aksi yang bersifat konkret dan dapat diukur, yaitu meningkatkan kecepatan atau mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu tindakan. Dalam konteks pemerintahan atau kebijakan publik, kata ‘mempercepat’ dapat mengandung makna simbolik yang kuat karena dapat menunjukkan komitmen dan keberhasilan pemerintah dalam memajukan pembangunan dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Data [6] mengandung penilaian positif atau dukungan terhadap suatu konsep atau gagasan, yaitu pemindahan ibu kota negara merupakan kemajuan yang paling signifikan yang belum terealisasi oleh pemimpin Indonesia sebelumnya. Sahnya RUU IKN menjadi undang-

Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajarannya
ISSN 2089-0117 (Print)
ISSN 2580-5932 (Online)
Vol 14, No 2, Oktober 2024
Page 252 - 270

undang menjadikan rencana pemindahan ibu kota negara telah memiliki payung hukum. Penggunaan kata ‘signifikan’ menunjukkan bahwa kemajuan yang telah dicapai oleh strategi tersebut sangat penting dan berarti.

Data [7] menunjukkan keyakinan akan manfaat yang akan didapat Indonesia melalui pemindahan ibu kota. Terdapat kata ‘diyakini’ yang menunjukkan pemindahan ibu kota akan membawa manfaat dan memperkuat rantai pasokan dan menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih strategis di jalur perdagangan dunia, arus investasi, dan inovasi teknologi. Oleh karena itu, kalimat tersebut memuat dukungan penghargaan.

c. Dukungan informasi

[8] Pemerintah kian serius mematangkan pembangunan ibu kota negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Terbaru, pemerintah memperkenalkan nama ibu kota negara baru sebagai "Nusantara". Nama tersebut telah disetujui Presiden Joko Widodo. Hal-hal lainnya terkait pemindahan ibu kota negara juga terus disiapkan mulai dari penyusunan rancangan Undang-Undang, infrastruktur, dan lainnya.

[9] Dilansir dari laman resmi IKN, ikn.go.id, ada delapan prinsip dari ibu kota negara.

[10] Ibu kota negara disebut akan dibangun untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju, sesuai visi Indonesia 2045.

[11] Mengapa Kalimantan Timur dipilih sebagai lokasi IKN? Aksesibilitas lokasi tinggi, dekat dengan dua kota besar, yakni Balikpapan dan Samarinda Infrastruktur utama tersedia, yaitu Jalan Tol Balikpapan-Samarinda dan Trans Kalimantan Bandara di Balikpapan dan Samarinda, serta Pelabuhan Terminal Peti Kemas Kariangau, Balikpapan dan Pelabuhan Semayang, Samarinda Struktur kependudukan heterogen dan terbuka Lahan luas, berstatus Hutan Produksi dan Perkebunan

[12] Sejumlah media asing menyoroti langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memindahkan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

[13] Prabowo telah menyampaikan komitmen dukungannya untuk IKN Nusantara. Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah harus punya keberanian untuk memindahkan ibu kota negara.

[14] Komitmen yang sama disampaikan Ganjar terhadap pemindahan ibu kota negara, sudah sejak lama. Ia pun mendukung rencana Presiden Jokowi yang akan membuat IKN Nusantara menjadi kawasan hijau, environmentally friendly dan tidak ada klaster industri.

[15] kata Emil, Jakarta berkembang menjadi mesin ekonomi dominan dan mengambil banyak peran besar. Karena terlalu vital roda pemerintahan dan ekonomi bertumpu di Jakarta, maka segala bentuk gejolak di Jakarta dinilai berisiko melumpuhkan aktivitas pemerintahan dan ekonomi dengan mudah (Retaduari, 2022).

Data [8] memberikan informasi tentang progres terbaru terkait rencana pemindahan ibu kota negara, pemerintah semakin serius dalam proses pembahasan dengan DPR RI yang rencananya pemindahan ibu kota baru akan dilakukan pada semester I, 2024 mendatang. Selain itu, kalimat tersebut juga memberikan informasi tentang pengenalan nama ibu kota baru dengan sebutan “Nusantara” yang telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo, serta persiapan lain yang terkait dengan pemindahan ibu kota negara seperti penyusunan rancangan Undang-Undang, infrastruktur, dan lainnya.

Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajarannya
ISSN 2089-0117 (Print)
ISSN 2580-5932 (Online)
Vol 14, No 2, Oktober 2024
Page 252 - 270

Kata ‘serius’ dalam kutipan tersebut memberi kesan bahwa pemindahan ibu kota negara bukan hal main-main. Kata ‘serius’ juga menunjukkan kuasa simbolik yang menggambarkan implementasi dari karakter kepemimpinan pemerintah Indonesia sebagai pembuat rencana, yang berpikir, dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan RUU IKN serta memberikan penjelasan pentingnya pindah ibu kota kepada Masyarakat.

Penggunaan frasa ‘ada delapan prinsip’ pada data [9] merupakan bentuk dukungan informasi bahwa ada sejumlah prinsip yang mendasari keputusan pemerintahan Jokowi untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, yaitu 1. Mendesain sesuai kondisi alam, 2. Bhinneka Tunggal Ika, 3. Terhubung, aktif, dan mudah diakses, 4. Rendah emisi karbon, 5. Sirkuler dan Tangguh, 6. Aman dan terjangkau, 7. Kenyamanan dan efisiensi melalui teknologi, 8. Peluang ekonomi.

Data [10] merupakan dukungan informasi tentang Visi Indonesia 2045. Kutipan ini diikuti dengan penjabaran tahapan mencapai Visi Indonesia 2045, yaitu dibangun dengan identitas nasional, ibu kota negara baru akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris, serta mempercepat transformasi ekonomi Indonesia. Kutipan ini memiliki kuasa simbolik dalam memotivasi atau menginspirasi bahkan mendorong para pemangku kepentingan untuk mendukung dan mencapai tujuan pemindahan ibu kota negara Indonesia.

Data [11] menggunakan kata tanya ‘mengapa’ untuk memberikan jawaban atas alasan pemilihan Kalimantan Timur sebagai titik Indonesia yang baru. Penggunaan kata tanya ‘mengapa’ dalam sebuah teks dapat memiliki kuasa simbolik, karena merupakan kata tanya yang menunjukkan keinginan untuk memahami alasan atau penyebab di balik suatu pernyataan atau tindakan. Dalam teks berita, penggunaan kata tanya ‘mengapa’ dapat membantu untuk memperjelas argumen dan mengeksplorasi pemikiran yang mendasarinya.

Data [12] menggunakan kata ‘sejumlah’ untuk memberikan informasi bahwa ada beberapa media asing yang ikut menanggapi wacana pemindahan ibu kota negara Indonesia, kata ‘menyoroti’ mengindikasikan perhatian khusus yang diberikan oleh media asing terhadap langkah-langkah pemerintahan. Keberadaan media asing dapat memberikan aspek simbolik, terutama dalam konteks politik atau hubungan internasional. Ini mengindikasikan adanya kuasa simbolik yang secara tersembunyi menggiring masyarakat untuk ikut mendukung pemindahan ibu kota.

Data [13] menunjukkan dukungan informasi dengan penggunaan kata ‘menyampaikan’. Kata ini dilanjutkan dengan sebuah penegasan ‘komitmen dukungannya’ yang mengandung kuasa simbolik. Kata ‘komitmen’ mencerminkan sebuah ikatan yang kuat dan terikat secara sosial, sehingga dapat mempengaruhi motivasi seseorang untuk mempertahankan janji atau kesepakatan yang telah dibuat. Pada kutipan tersebut memperjelas hubungan antara probowo Subianto dengan Presiden Jokowi.

Data [14] penggunaan frasa ‘sudah sejak lama’ yang menunjukkan kesetiaan. Melalui dukungan Ganjar Pranowo terhadap pemindahan ibu kota negara memberikan informasi rencana Presiden Jokowi yang akan menjadikan ibu kota negara baru sebagai kawasan hijau, *environmentally friendly* dan tidak ada klaster industri. Kata ‘komitmen’ menunjukkan suatu sikap atau perilaku untuk bertindak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan atau diputuskan sebelumnya. Kata ‘komitmen’ melibatkan konsistensi dalam tindakan dan kesediaan untuk bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan yang diambil, serta menjunjung tinggi integritas dan nilai-nilai yang telah diputuskan sebelumnya.

Data [15] memberikan penjelasan bahwa peran Jakarta sebagai mesin ekonomi dan dominan karena menjadi pusat pemerintahan di Indonesia. Kata ‘mesin’ yang disandingkan dengan kata ekonomi memberi kesan bahwa ada simbol kekuatan disana. Kata ‘melumpuhkan’ memiliki kuasa simbolik yaitu, gejolak di Jakarta dapat menghentikan atau merusak roda

Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajarannya
ISSN 2089-0117 (Print)
ISSN 2580-5932 (Online)
Vol 14, No 2, Oktober 2024
Page 252 - 270

pemerintahan dan ekonomi dengan mudah.

Berikutnya adalah pemaparan bentuk penolakan yang terdapat dalam pemberitaan pemindahan ibu kota negara Indonesia di media *Kompas.com* dapat dilihat dalam paparan data berikut ini.

a. Menggunakan kata 'tidak' atau padanan katanya

[16] Anies Baswedan memberikan kritik soal rencana pemindahan ibu kota negara. Ia menilai pemindahan IKN ke Kaltim tidak akan menyelesaikan problem kemacetan di Jakarta.

Data [16] merupakan bentuk penolakan. Ketidaktepatan kebijakan pemindahan ibu kota negara untuk mengurai kemacetan tidak dapat diterima. Apakah Jakarta akan bebas dari kemacetan? Tentu tidak. Jakarta bisa bebas dari kemacetan jika dibuat kebijakan pusat perbankan, keuangan dan bursa saham semuanya ikut pindah ke ibu kota negara baru (Hidayat, 2022). Bicara tentang kemacetan Jakarta, pemerintahan hanya menyumbang kurang dari 7 persen kemacetan, jadi tidak akan ada bedanya walaupun Jakarta tidak menjadi ibu kota negara lagi. Jakarta merupakan kota dengan kegiatan rumah tangga dan ekonomi.

Kata 'tidak' digunakan untuk memberikan suatu penegasan penolakan terhadap sebuah pernyataan atau tindakan, namun karena pernyataan ini diungkapkan oleh pejabat negara akhirnya memiliki konotasi politik atau simbolik tertentu, maka pernyataan tersebut dapat membawa makna yang lebih dalam dan kompleks daripada sekadar sebuah pendapat biasa yang menggiring masyarakat untuk berpikir bahwa alasan pemindahan ibu kota karena kemacetan adalah mengada-ada.

b. Memberikan alasan penolakan

[17] Para kritikus mengatakan undang-undang itu dipercepat dengan konsultasi publik dan penelitian lingkungan yang terbatas.

[18] Adanya aktivis lingkungan yang mengkritisi dampak relokasi ibu kota terhadap hutan Kalimantan Timur yang menghilang dengan cepat.

Data [17] memberikan alasan penolakan. Penggunaan kata 'dipercepat' mengesankan sesuatu yang buru-buru atau tergesa-gesa yang menggambarkan pemerintah tidak serius dalam membuat kebijakan dan dibuat berdasarkan keinginan sepihak dari pemerintah tanpa melibatkan banyak pihak. Mantan legislator DPR RI yang sekarang menjabat sebagai wakil gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi mengatakan "sejak awal pembangunan IKN Nusantara ini merupakan rencana pusat (Islam, 2022).

Data [18] menggunakan alasan penolakan. Penggunaan kata 'dampak' yang memberikan penjelasan bahwa akibat dari pemindahan ibu kota negara ke hutan Kalimantan Timur akan menjadi ancaman baik untuk penduduk lokal, flora dan fauna di sana. Kata 'dampak' sejatinya memiliki kuasa simbolik yang menggiring masyarakat untuk menolak karena akan ada akibat negatif dari keputusan pindah ibu kota.

Tabel 2 Temuan Data Bentuk dukungan dan Penolakan di Media *Tempo.com*

No.	Sumber	Dukungan	Penolakan
1.	Selasa, 18 Januari 2022 dengan judul *"RUU IKN Sah, Jatam: Jokowi dan DPR Tak Peduli Soal Kesulitan Ekonomi"*(Silaban, 2022)	[20]	[21], [22], [23], [24], [28]
2.	Rabu, 19 Januari 2022 dengan judul *"Koalisi Masyarakat Kaltim Anggap UU Ibu Kota Negara Cacat Prosedural"*(Widyastuti, 2022)	[19]	[25], [26], [27], [29]

Bentuk dukungan yang ditemukan dalam pemberitaan pemindahan ibu kota negara Indonesia di *Tempo.com* dapat kita lihat dalam paparan berikut ini.

a. Dukungan evaluatif

Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajarannya
ISSN 2089-0117 (Print)
ISSN 2580-5932 (Online)
Vol 14, No 2, Oktober 2024
Page 252 - 270

[19] Pemerintah, kata Suharso, yakin bahwa proses pembahasan yang sangat baik ini akan menjadikan RUU Ibu Kota Negara sebagai dasar dalam menghadirkan ibu kota negara baru yang handal dan tangguh "dan mampu menjawab tantangan ke depan".

Data [19] karena terdapat penghargaan dengan adanya kata dan frasa 'sangat baik', 'handal dan tangguh' dan 'mampu menjawab tantangan ke depan'. Hal ini juga mengindikasikan kuasa simbolik yang bermakna positif memuji ibu kota negara baru dengan penuh keyakinan.

b. Dukungan informasi

[20] DPR hari ini mengesahkan RUU IKN menjadi undang-undang sebagai payung hukum pemindahan ibu kota.

Data [20] memuat kata-kata yang digunakan untuk mempengaruhi persepsi dan keyakinan masyarakat tentang kebijakan pindah ibu kota, terdapat unsur-unsur kuasa simbolik dalam penggunaannya. Tindakan DPR dalam mengesahkan undang-undang menunjukkan kuasa dan peran legislatif dalam pembentukan kebijakan negara. Ini juga dapat mencerminkan pengaruh politik yang dimiliki oleh DPR dalam mewujudkan pemindahan ibu kota. Pengesahan undang-undang sebagai payung hukum menunjukkan kekuatan simbolik.

Berikutnya adalah pemaparan bentuk penolakan yang terdapat dalam pemberitaan pemindahan ibu kota negara Indonesia di media *Tempo.com* dapat kita lihat dalam paparan data berikut ini.

a. Memberikan alasan penolakan

[21] Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menilai pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) merupakan bentuk pemborosan di tengah tekanan ekonomi karena pandemi Covid-19.

[22] "Presiden Jokowi dan DPR tampak tidak peduli dengan persoalan kesulitan ekonomi negara di tengah pandemi Covid-19.

[23] Pembahasan RUU IKN yang cenderung berlangsung kilat memperkuat indikasi adanya hegemoni oligarki pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dan DPR pada periode ini.

[24] Jatam juga memandang pengesahan RUU IKN hanya akan menguntungkan para pemegang konsesi tambang, sawit, hutan, dan kayu yang telah lama menguasai lahan- lahan di bakal ibu kota baru.

Data [21] menyatakan bahwa pembangunan ibu kota negara baru merupakan bentuk pemborosan, yang berarti kalimat tersebut menyatakan penolakan terhadap ibu kota negara baru. Kata 'pemborosan' menunjukkan suatu tindakan atau perilaku yang tidak diinginkan atau buruk, dalam kalimat ini terdapat penggiringan opini bahwa pemerintah mengabaikan kondisi perekonomian negara, ketidakpedulian dan menggambarkan ketidakseriusan dalam menjalankan tugas dan amanat pengurusan urusan hak rakyat. Kata 'pemborosan' sebagai kuasa simbolik, karena tidak hanya merujuk pada tindakan yang menghabiskan uang atau sumber daya yang tidak perlu, tetapi juga dapat merujuk pada tindakan yang tidak efektif atau tidak produktif dalam mencapai tujuan tertentu.

Data [22] menunjukkan penolakan dengan memberikan alasan. Adanya klausa 'tampak tidak peduli dengan persoalan kesulitan ekonomi negara' memberi kesan bahwa pemerintah sengaja membuat kebijakan berbiaya besar walaupun kondisi keuangan tidak memungkinkan. Dengan unsur kesengajaan ini, mengindikasikan kuasa simbolik yang menggiring opini masyarakat untuk melihat kerja pemerintah yang tidak memprioritaskan kepentingan rakyat.

Data [23] merupakan bentuk penolakan dengan memberikan alasan. Adanya kata 'abai' menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tak mendengar suara penolakan warga. Penggunaan frasa 'berlangsung kilat', 'hegemoni oligarki' pada kutipan tersebut

Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajarannya
ISSN 2089-0117 (Print)
ISSN 2580-5932 (Online)
Vol 14, No 2, Oktober 2024
Page 252 - 270

mengandung unsur kuasa simbolik. Frasa tersebut menggambarkan bahwa pembahasan RUU IKN dilakukan dengan sangat cepat dan tanpa memperhatikan berbagai aspek penting yang perlu dipertimbangkan secara matang, sehingga dapat menimbulkan kesan bahwa proses tersebut tidak transparan dan berlangsung dengan cara yang tidak wajar, ditandai dengan mudahnya proses pembahasan hingga mulusnya jalan pengesahan RUU IKN.

Data [24] merupakan bentuk penolakan dengan memberikan alasan. Penggunaan kata ‘dilalaikan’ menunjukkan bahwa pemerintah tidak memprioritaskan masyarakat dalam kebijakan pemindahan ibu kota negara. Kalimat dalam kutipan tersebut dapat dianggap sebagai kuasa simbolik yang dipahami sebagai upaya untuk mempengaruhi persepsi dan keyakinan masyarakat tentang dampak dari pemindahan ibu kota negara Indonesia terhadap pemegang hak atas tanah, serta konsekuensi dari kebijakan tersebut terhadap masyarakat.

b. Menggunakan komentar

[25] Mendesak pemerintah untuk mencabut Undang-undang Ibu Kota Negara atau UU IKN karena dinilai cacat prosedural. Salah satu cacat procedural.

[26] Koalisi menilai, bahwa Konsultasi Publik yang dilakukan oleh DPR dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas itu sangat tertutup, cenderung dipaksakan, serta tidak melibatkan masyarakat.

[27] koalisi juga menilai rencana pemindahan ibu kota negara sama sekali tidak memiliki dasar kajian kelayakan yang meliputi aspek kemaslahatan, keselamatan.

Data [25] berupa penilaian terhadap UU IKN yang cacat secara prosedural. Adanya kata ‘menolak’ dan ‘mendesak’ dapat dianggap sebagai indikasi kuasa simbolik karena kedua kata tersebut memiliki konotasi atau makna yang lebih luas daripada arti asalnya. Kata ‘menolak’ mengacu pada tindakan untuk menolak atau menentang suatu hal atau ide. Namun, kata ‘menolak’ juga dapat menjadi simbol atau lambang dari suatu sikap atau pandangan yang kritis.

Penolakan dengan komentar juga terdapat pada data [26] dan [27]. Komentar yang diungkapkan berupa penilaian terkait ketidaklayakan UU IKN yang tidak memiliki dasar kajian yang baik, dilakukan dengan tertutup, dan tidak melibatkan masyarakat sehingga terkesan dipaksakan dan merugikan masyarakat dengan menggunakan kata ‘dinilai’ dan ‘menilai’. Dalam 2 data ini terkandung kuasa simbolik yang menggiring opini masyarakat untuk mempertanyakan kelayakan UU IKN dan ikut dalam kelompok yang menolak.

c. Menggunakan usul atau saran

[28] Bahkan, kata Melky, ancaman terhadap perluasan kerusakan sosial-ekologis di Kalimantan Timur tidak menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan pemindahan IKN. “Demikian juga dengan persoalan kerusakan ekologis di Jakarta yang sebelumnya menjadi alasan pemindahan IKN oleh Presiden Jokowi, bukannya diurus serius, justru lari dari masalah,” katanya.

[29] “Kami mendesak pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan krisis yang terjadi di Jakarta dan Kalimantan Timur, bukan pemindahan ibu kota baru,” tulis Koalisi.

Data [28] menggunakan usul atau saran dengan frasa ‘bukannya diurus serius’. Frasa ini memberikan saran secara tersembunyi dibalik sindiran yang pada intinya negara harus mengurusi dengan serius permasalahan yang sedang terjadi di Jakarta maupun di Kalimantan Timur. Penggunaan kata ‘ancaman’ pada kutipan tersebut menunjukkan kuasa simbolik yang menggiring opini masyarakat bahwa kebijakan ini membahayakan hutan Kalimantan Timur.

Data [29] menggunakan usul atau saran. Kata ‘mendesak’ menunjukkan sebuah tuntutan yang diharapkan segera dilakukan sebuah tindakan. Kata ini digunakan untuk mengambil keputusan

Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajarannya Vol 14, No 2, Oktober 2024
ISSN 2089-0117 (Print) Page 252 - 270
ISSN 2580-5932 (Online)

atas situasi sulit saat ini dengan menggunakan kata ‘krisis’ yang mengharuskan tindakan cepat, responsif, dan strategis untuk mengatasi situasi tersebut. Penggunaan kata ‘bukan’ menunjukkan adanya pilihan sekaligus bentuk penolakan. Kata ‘bukan’ menandakan kekeliruan yang telah diambil oleh pemerintah dalam memutuskan pindah ibu kota.

Tabel 3 Temuan Data Bentuk dukungan dan Penolakan di Media *Suaraislam.com*

No.	Sumber	Dukungan	Penolakan
1.	Rabu, 19 Januari 2022 dengan judul *“WALHI: UU Ibu Kota Negara Baru Inkonstitusional Seperti Omnibus Law”*(Lesmana, 2022)		[30], [31], [32], [33], [35], [36], [42], [43].
2	Rabu, 19 Januari 2022 dengan judul “*Hancur-hancuran Pindah Ibu Kota Negara*”(Fadillah, 2022)		[34], [37], [38], [39], [40], [41].

Bentuk dukungan tidak ditemukan dalam pemberitaan pemidahan ibu kota negara Indonesia di media Suaraislam.com, hanya ditemukan bentuk penolakan yang dapat kita lihat dalam paparan berikut ini.

a. Menggunakan kata ‘tidak’ atau padanan katanya

[30] Sementara Fraksi PKS tidak setuju hasil pembahasan RUU IKN.

[31] Walhi mendesak pemerintah dan DPR untuk menghentikan semua tindakan dan kebijakan dalam penetapan Ibu Kota Negara.

[32] UU IKN ini tidak melalui proses konsultasi terbuka kepada publik.

Data [30] dengan kata tidak yang merujuk pada sikap sebuah partai politik. Meskipun fraksi yang mendukung lebih banyak namun pernyataan sikap menolak dari satu fraksi membuat kalimat ini lebih menonjol dan digunakan media untuk membuat pro kontra di tengah masyarakat. Penggunaan frasa ‘tidak setuju’ merupakan indikasi kuasa simbolik yakni, sebuah penentangan terhadap keputusan. Apalagi pernyataan ini diungkapkan oleh partai politik, sehingga memiliki pengaruh cukup besar.

Data [31] terdapat kata ‘mendesak’ menunjukkan keberatan atau ketidakpuasan yang kuat dan ingin segera diatasi, Walhi merasa keberatan dengan kebijakan pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Kalimantan Timur dengan meminta perubahan atau pencabutan kebijakan tersebut, maka terdapat unsur kuasa simbolik yang menggiring opini bahwa UU IKN harus dicabut. Data [32] melanjutkan bentuk penolakan yang ada pada data [31], yakni proses pembahasan RUU IKN yang tidak melalui proses konsultasi yang baik.

b. Memberikan alasan penolakan

[33] “Ini seperti mengulang kembali UU Omnibus Law yang disahkan secara cepat, sangat cepat sekali prosesnya, prosesnya seperti proses Omnibus Law, tidak ada konsultasi publik yang layak, hanya ada konsultasi yang sifatnya formalitas saja,” kata Sawung

Data [33] merupakan penolakan dengan alasan. Adanya frasa ‘mengulang kembali’ dan ‘formalitas saja’ menunjukkan ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap suatu keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah. Pengesahan UU IKN ini terkesan mengabaikan aspek partisipasi dan transparansi dalam pengambilan keputusan yang demokratis. Kalimat dalam kutipan ini mengungkap kecurigaan adanya motif atau kepentingan tertentu sehingga tampak tidak menggunakan pertimbangan rasional atau kepentingan umum.

c. Menggunakan Komentar

[34] Banyak pihak menilai pengesahan RUU ini tergesa-gesa, dipaksakan, dan sama sekali bukan untuk kepentingan rakyat.

[35] Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai Undang-Undang

Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajarannya
ISSN 2089-0117 (Print)
ISSN 2580-5932 (Online)
Vol 14, No 2, Oktober 2024
Page 252 - 270

Ibu Kota Negara yang dibuat super cepat oleh pemerintah dan DPR seperti mengulang kembali proses inkonstitusional dalam UU Cipta Kerja atau Omnibus Law

[36] RUU IKN ini diproses super cepat hanya sekitar 40 hari sejak pertama kali anggota Panitia Khusus RUU IKN ditetapkan pada 7 Desember 202.

[37] Negara ini memang sudah hancur-hancuran dimana kedaulatan rakyat sudah dihabisi.

[38] Rakyat berhak marah atas kongkalikong Pemerintah dengan DPR dalam upaya menggoalkan Undang-Undang yang sarat dengan kepentingan. Kejahatan terberat adalah membunuh Ibukota lama dan berspekulasi dengan ibukota baru.

Data [34], [35] dan [36] menggunakan frasa ‘dipaksakan’, ‘super cepat’, dan ‘disahkan secara cepat, sangat cepat sekali prosesnya’ memberi kesan bahwa pemerintah tidak serius dalam membuat kebijakan dan berdasarkan keinginan sepihak dari pemerintah tanpa melibatkan banyak pihak. Keempat kutipan di atas merupakan bentuk penolakan yang disertai alasan sehingga dapat dimaknai sebagai kritik rasional.

Kata ‘dipaksakan’, ‘super cepat’ dan sejenisnya mengandung unsur kuasa simbolik, terutama jika dilihat dari konteks penggunaannya bahwa pengesahan RUU tersebut tidak dilakukan secara transparan atau sesuai dengan prosedur yang benar. Selain itu, frasa ‘sama sekali bukan untuk kepentingan rakyat’ pada kalimat tersebut juga dapat mempengaruhi pandangan pembaca bahwa pengesahan RUU tersebut dilakukan tanpa memperhatikan kepentingan rakyat. Kata ‘inkonstitusional’ dalam Data [35] merupakan kuasa simbolik yang menunjukkan sebuah tindakan yang melanggar hukum.

Data [37] dan [38] menggunakan komentar yang isinya berupa opini kritis terhadap pemerintah. Pada data [37] menunjukkan komentar atas matinya kedaulatan rakyat. Dalam konteks berita ini, beragam opini kritis diungkapkan yang menunjukkan kuasa simbolik yang mampu mempengaruhi masyarakat untuk ikut menolak kebijakan pemindahan ibu kota negara. Data [38] terdapat penggunaan kata ‘kongkalikong’ mengindikasikan adanya kuasa tersembunyi atau perjanjian yang tidak jujur, yang melibatkan pihak-pihak tertentu dalam keputusan tersebut. Istilah ‘kongkalikong’ mengacu pada kolusi, persekongkolan, atau kerjasama yang tidak transparan untuk mencapai tujuan tertentu, seringkali dengan motif yang tidak jujur atau merugikan pihak lain.

Penggunaan kata ‘kejahatan’ dan ‘membunuh’ dalam konteks pro kontra pindah ibukota memiliki kuasa tersembunyi atau makna yang lebih dalam. Penggunaan kata tersebut bisa diartikan secara simbolik sebagai menghancurkan atau mengabaikan nilai-nilai dan identitas ibukota lama dan menciptakan spekulasi atau ketidakpastian dengan ibukota baru. Kata ‘spekulasi’ pada data [38] maksudnya disampaikan dengan tujuan untuk mempengaruhi pandangan atau tindakan orang lain, atau untuk mempertahankan kepentingan dalam pemindahan ibu kota.

[39] Ini adalah cara mengelola negara khas kolonial. Penguasa yang memaksa, berwajah penjajah. Rakyat pribumi ditempatkan sebagai budak yang harus taat.

[40] Ibu Kota Negara adalah proyek besar yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Tidak ada hubungan signifikan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia.

[41] Pemerintah Jokowi dan DPR bergabung bersama mengabaikan dan membohongi rakyat. Pindah Ibu Kota Negara dianggap sama dengan kucing memindahkan anak- anaknya. Menggigit leher si anak yang tak

Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajarannya
ISSN 2089-0117 (Print)
ISSN 2580-5932 (Online)
Vol 14, No 2, Oktober 2024
Page 252 - 270

berdaya.

[42] Walhi menyebut UU IKN ini terkesan hanya dibuat berdasar keinginan penguasa saja, tidak ada kepentingan yang memihak kepada rakyat dalam rencana pindah Ibu Kota tersebut.

[43] "Kita masih mengalami pandemi juga masih dilakukan pembuatan undang-undang yang tidak ada urgensinya dilakukan saat ini, apalagi kalau kita lihat ini memakan biaya dan dampak lingkungan yang sangat besar,"

Penggunaan kata 'kolonial', 'penjajah', 'budak' merupakan simbol penjajahan dan penindasan oleh orang yang berkuasa terhadap rakyat. Kalimat pada data [39] menunjukkan penolakan dengan komentar yang menilai kondisi kehidupan rakyat Indonesia seperti dijajah dan dipaksa tanpa mampu melawan. Kutipan tersebut menggambarkan bahwa dalam pengelolaan negara tersebut terdapat praktik atau kebijakan yang mirip dengan apa yang terjadi pada masa kolonial, di mana pemerintah asing atau entitas eksternal mempengaruhi atau mengontrol negara tersebut.

Data [40] merupakan penolakan dengan komentar terhadap siapa yang diuntungkan dengan adanya kebijakan pindah ibu kota ini. Frasa 'tidak ada hubungan' antara pindah ibu kota dengan kesejahteraan rakyat, memiliki kuasa simbolik yang menggiring opini kekeliruan pemerintah dalam membuat kebijakan. Kutipan tersebut menggambarkan bahwa tidak ada kaitan yang signifikan antara tindakan tersebut dengan peningkatan kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. Lebih jauh lagi, kalimat tersebut menggambarkan dampak negatif yang mungkin timbul, seperti perampokan kekayaan negara, korupsi, kolusi, penjualan atau penjaminan aset negara.

Data [41], [42] dan [43] merupakan bentuk penolakan dengan menggunakan komentar. Ketiga kutipan tersebut memberikan penilaian terhadap peristiwa yang sedang terjadi. Misalnya, data [41] dengan kalimat 'DPR terus melanjutkan kebiasaan buruk dalam membuat UU sebagaimana UU KPK, Minerba, Perpu Pandemi, hingga UU Cipta Kerja'. Kalimat ini menunjukkan sindiran terhadap kinerja DPR yang keseringan melakukan main ketok palu yang tergambar pada kalimat 'Diam-diam, minim masukan publik, masa bodoh atas reaksi rakyat, serta hanya berorientasi pada kepentingan korporat dan oligarki. UU dibuat untuk merugikan rakyat'. Kalimat ini mengandung kuasa simbolik yang menggambarkan bagaimana kekuasaan digunakan untuk merugikan rakyat.

Hal yang sama juga dijumpai pada data [42] yang merupakan bentuk penolakan dengan memberikan komentar. Frasa 'keinginan penguasa saja' merupakan penilaian terhadap kinerja pemerintahan dalam membuat kebijakan. Kalimat ini juga mengandung kuasa simbolik yang menggambarkan bagaimana kekuasaan dapat digunakan untuk merugikan rakyat dan memperkuat posisi kekuasaan satu pihak.

Data [43] menggunakan klausa 'tidak ada urgensinya dilakukan saat ini' dalam konteks tersebut menunjukkan bahwa suatu keputusan tidak dianggap penting atau mendesak, yang dapat menggambarkan kekuasaan yang dimiliki oleh orang-orang yang membuat keputusan tersebut. Penggunaan kalimat tersebut dapat digunakan sebagai simbol untuk memperkuat posisi kekuasaan orang-orang yang membuat keputusan, yang dapat memiliki implikasi bagi masyarakat yang terdampak oleh keputusan tersebut.

Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajarannya
ISSN 2089-0117 (Print)
ISSN 2580-5932 (Online)
Vol 14, No 2, Oktober 2024
Page 252 - 270

Latar Belakang Munculnya Dukungan dan Penolakan

Tabel 4 Latar belakang Dukungan dan Penolakan

No.	Media	Dukungan	Penolakan
1.	Kompas.com	Politik 8 data Ekonomi 2 data Sejarah 1 data Lingkungan 4 data	Hukum 1 data Politik 1 data Lingkungan 1 data
2.	Tempo.com	Hukum 2 data	Hukum 2 data Politik 4 data Ekonomi 2 data Lingkungan 1 data
3.	Suaraislam.com		Hukum 7 data Politik 6 data Ekonomi 1 data

Dari pemaparan hasil dan pembahasan di atas terlihat *Kompas.com* memberikan bentuk dukungan politik, ekonomi, sejarah dan lingkungan. *Tempo.com* memberikan bentuk dukungan hukum. *Suaraislam.com* tidak memberikan bentuk dukungan. *Kompas.com* memberikan bentuk penolakan hukum, politik dan lingkungan. *Tempo.com* memberikan bentuk penolakan hukum, politik dan ekonomi. *Suaraislam.com* memberikan bentuk penolakan hukum, politik dan ekonomi.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi bentuk dukungan dan penolakan dalam wacana pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia yang disajikan oleh media daring. Dukungan yang ditemukan meliputi dukungan emosional, evaluatif, dan informasional, sementara penolakan diwujudkan dalam bentuk penggunaan kata negatif, pemberian alasan penolakan, dan saran alternatif. Melalui analisis wacana kritis dan teori kuasa simbolik, ditemukan bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai alat kuasa simbolik yang dapat mempengaruhi opini publik dan legitimasi kebijakan.

Dalam hal produksi teks, masing-masing media dipengaruhi oleh ideologi politik dan ekonomi mereka, sehingga wacana yang dihasilkan merefleksikan kepentingan tertentu. Di sisi konsumsi, audiens menerima dan memproses teks berdasarkan konteks sosial mereka, yang memengaruhi bagaimana mereka merespons dukungan atau penolakan terhadap kebijakan pemindahan ibu kota.

Berdasarkan temuan ini, disarankan agar pemerintah lebih inklusif dalam proses pengambilan kebijakan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk media, pakar, dan masyarakat umum, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya diterima oleh kalangan tertentu. Pemerintah juga perlu lebih transparan dalam menyampaikan informasi terkait kebijakan besar seperti pemindahan ibu kota agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang komprehensif dari berbagai sisi, terutama terkait dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Penelitian ini memiliki implikasi signifikan bagi dunia jurnalisme dan pengambil kebijakan. Bagi media, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya keseimbangan dan objektivitas dalam penyajian informasi, karena media berperan besar dalam membentuk wacana publik. Bagi pengambil kebijakan, temuan ini menggarisbawahi perlunya mengelola wacana publik secara bijaksana, mengingat bagaimana kuasa simbolik dalam bahasa dapat memengaruhi penerimaan kebijakan oleh masyarakat luas.

Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajarannya
ISSN 2089-0117 (Print)
ISSN 2580-5932 (Online)
Vol 14, No 2, Oktober 2024
Page 252 - 270

DAFTAR RUJUKAN

Adhi, I. S. (2022). Reaksi Media Asing soal Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia, Singgung Nama Nusantara hingga Ahok. Kompas.Com. https://www.kompas.com/global/read/2022/01/19/113000170/reaksi-media-asing-soal-pemindahan-ibu-kota-negara-indonesia-singgung?page=all

Anam, K. (2022). Pro Kontra Ibu Kota Baru RI, Simak Perdebatan Ini! CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20220128201730-4-311394/pro-kontra-ibu-kota-baru-ri-simak-perdebatan-ini

bbc.com. (2022a). Ibu Kota Nusantara: Penggunaan APBN untuk Pembangunan IKN, Pakar Sebut "Akan Korbankan Program Masyarakat." Bbc.Com. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60021821

bbc.com. (2022b, January 18). UU IKN Resmi Disahkan, Nusantara Disetujui Jadi Nama Ibu Kota Baru. Bbc.Com. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60036335

Bourdieu, P. (1991). *Language and Symbolic Power*. Polity Press.

Bramasta, D. B. (2022). Tentang Ibu Kota Baru Nusantara dan 8 Hal yang Ditawarkan, Salah Satunya Nol Persen Kemiskinan pada 2035. Kompas.Com. https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/18/093100265/tentang-ibu-kota-baru-nusantara-dan-8-hal-yang-ditawarkan-salah-satunya-nol

Budiman, A. (2021). Isu Presiden 3 Periode Disebut Picu Spekulasi Demi Ibu Kota Negara. Tempo.Com. https://nasional.tempo.co/read/1505125/isu-presiden-3-periode-disebut-picu-spekulasi-demi-ibu-kota-negara

Chomsky, N. (1997). *Media Control: The Spectacular Achievements of Propaganda*. Steven Stories Press.

Eriyanto. (2013). *Analisis Naratif: Dasar-dasar dan Penerapannya dalam Analisis Teks Berita Media*. Kencana.

Fadillah, M. R. (2022). *Hancur-hancuran Pindah Ibu Kota*. Suaraislam.Com. https://www.voa-islam.com/read/world-analysis/2022/01/19/79711/hancurhancuran-pindah-ibu-kota-negara/

Farisa, F. C. (2022). *Pemindahan Ibu Kota Negara: Gagasan Soekarno, Mimpi Soeharto, dan Upaya Jokowi*. Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2022/03/02/21161811/pemindahan-ibu-kota-negara-gagasan-soekarno-mimpi-soeharto-dan-upaya-jokowi?page=all

Haryatmoko. (2019). *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis): Landasan Teori, Metodologi dan Penerapan* (H. Zaskuri (ed.); 3rd ed.). PT RajaGrafindo Persada.

Islam, S. (2022). Rakyat Diminta Urunan Bangun IKN, Wagub Kaltim: Beli Minyak Saja Susah. Suaraislam.Com. https://suaraislam.id/rakyat-diminta-urunan-bangun-ikn-wagub-kaltim-beli-minyak-saja-susah/

Jumadi. (2017). *Wacana, Kekuasaan & Pendidikan Bahasa* (M. Rafiek (ed.)). Pustaka Pelajar.

Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara*.

Retaduari, E. A. (2022). *Pemindahan Ibu Kota Negara di Mata Tokoh Politik Prabowo, Ganjar, Anies, Ridwan Kamil*. Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2022/02/08/07191021/pemindahan-ibu-kota-negara- di-mata-tokoh-politik-prabowo-ganjar-anies-ridwan?page=all

Saputra, S. D. (2021) Analisis Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Pertahanan (Studi Kasus Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara). *Ekonomi Pertahanan : Jurnal Kajian Akademisi dan Literasi Ilmu Ekonomi Pertahanan*, 7(2)

Sembiring, L. J. (2021a). *Bye Jakarta! Ini Bocoran Jadwal Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim*. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20211210075803-4-298151/bye-jakarta-ini-bocoran-jadwal-pemindahan-ibu-kota-ke-kaltim

Sembiring, L. J. (2021b). *Paket Kilat! DPR Target RUU IKN Disahkan Awal 2022*. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20211209153259-4-298008/paket-kilat-dpr-target-ruu-ikn-disahkan-awal-2022

Shaid, N. J. (2022). *6 Alasan Ibu Kota Negara Pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur*. Kompas.Com. https://money.kompas.com/read/2022/02/11/052456426/6-alasan-ibu-kota-negara-pindah-dari-jakarta-ke-kalimantan-timur?page=all.

Silaban, M. W. (2022). *RUU IKN Sah, Jatam: Jokowi dan DPR Tak Peduli Soal Kesulitan Ekonomi*. Tempo.Com. https://bisnis.tempo.co/read/1551407/ruu-ikn-sah-jatam-jokowi-dan-dpr-tak-peduli-soal-kesulitan-ekonomi

Silalahi, R. M. P. (2018). Perempuan dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan: Sebuah Analisis Wacana Kritis. *Unika Atma Jaya*, 429–433.

Taufiq, M. (2020). Pemindahan Ibu Kota dan Potensi Konektivitas Pemerataan Ekonomi. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 8(1), 27-39.

Widyastuti, R. A. Y. (2022). *Koalisi Masyarakat Kaltim Anggap UU Ibu Kota Negara Cacat Prosedural*. Tempo.Com. https://bisnis.tempo.co/read/1551615/koalisi-masyarakat-kaltim-anggap-uu-ibu-kota-negara-cacat-prosedural?page_num=2